



Jurnal Homepage : <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/eduteach/>

STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SMP NEGERI 3 KAYUAGUNG

Doni Gunawan¹, Bukman Lian², Nuril Furkan³

Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

e-mail: doni.gunawan1978@gmail.com¹, bukmanlianunivpgri-palembang.ac.id²,
nurilfurkan.97@gmail.com³

Abstrak

Program Sekolah Penggerak merupakan upaya pemerintah mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi kepala sekolah dalam Implementasi program sekolah penggerak di SMP Negeri 3 Kayuagung. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak yakni (1) penguatan sumber daya manusia, (2) pengelolaan pembelajaran yang berbasis pendekatan pembelajaran berdeferensiasi, (3) penyediaan sarana prasarana pendukung program sekolah penggerak, (4) pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah dan pembiayaan dari stakeholders, (5) proses digitalisasi sekolah seperti digitalisasi bahan ajar, administrasi mengajar guru, peningkatan kapasitas dan kecepatan internet sekolah, dan penyediaan perangkat komputer untuk proses pembelajaran, dan (6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan program, pelaksanaan dan pengawasan program ini.

Kata kunci: Strategi; Kepala Sekolah; Program Sekolah Penggerak

Abstract

The “Sekolah Penggerak” Program is a government effort to realize the vision of sovereign, independent, and individual Indonesian education through the creation of “Pelajar Pancasila”. This study aims to describe and analyze the principal's strategy in implementing the “Sekolah Penggerak” program at SMP Negeri 3 Kayuagung. Data collection used interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using interactive model analysis techniques from Miles and Huberman. The results of this study show the principal's strategy in implementing the “Sekolah Penggerak” program, namely (1) strengthening human resources, (2) learning management based on a differentiated learning approach, (3) providing supporting facilities and infrastructure for the “Sekolah Penggerak” program, (4) financing by optimizing financing sources from school operational assistance funds and financing from stakeholders, (5) the process of digitizing schools such as digitizing teaching materials, teacher teaching administration, increasing school internet capacity and speed, and providing computer devices for the learning process, and (6) stakeholder involvement in program preparation, implementation and supervision of this program.

Keywords: Strategy, Headmaster, Sekolah Penggerak Program

1. Pendahuluan

Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dalam lima tahun terakhir ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kebijakan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang tertuang dalam kebijakan merdeka belajar dan saat ini sudah memasuki episode 26 (dua puluh enam). Episode Merdeka belajar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda namun tetap merupakan rangkai yang saling mendukung untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan episode merdeka belajar yakni lahirnya Program Sekolah Penggerak atau dengan istilah PSP. Sekolah Penggerak merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila [1, p. 126]. Program ini menyajikan pembelajaran yang berpusat pada hasil pada kompetensi literasi, numerasi, dan berkarakter untuk menjawab tantangan pendidikan terkait ekosistem dan guru. Kelebihannya adalah menjadikan kegiatan belajar menyenangkan, pelayanan yang baik, guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, dan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, soft skill, pengembangan karakter, dan sistem penilaian bersifat formatif atau mendukung [2].

Keberhasilan pada pelaksanaan program sekolah penggerak sangat dipengaruhi oleh keberadaan kepala sekolah sebagai pemimpin, figur utama yang memimpin pembelajaran dan mengelola satuan Pendidikan. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri [3]. Sekolah Penggerak menjadi agen perubahan bagi sekolah lain di sekitarnya, menjadi contoh, dan pusat berbagi pengetahuan dan wawasan. Melalui sistem gotong-royong, program ini mampu menciptakan ekosistem perubahan. Hal ini dapat terwujud melalui peran serta tanggungjawab kepala sekolah [4]. Kepala sekolah merupakan pimpinan tunggal di sekolah yang mempunyai tanggungjawab mengajar dan mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan [5, p. 23].

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin satuan pendidikan harus memiliki strategi guna mencapai keberhasilan. Hal tersebut sesuai pendapat Etisnawati menjelaskan bahwa kunci suksesnya strategi kepala sekolah adalah adanya kepribadian yang baik dan dapat dicontoh oleh rekan sejawat, memiliki kompetensi profesional dalam bidang manajerial, memahami ilmu mengenai teori dan praktik pendidikan atau kurikulum, serta mampu mendesain pembelajaran dengan baik [1]. Strategi yang dirancang oleh kepala sekolah juga akan efektif jika mampu menggerakkan, memberikan motivasi, dan mempengaruhi orang-orang. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari yang menyimpulkan bahwa Kepala Sekolah telah melakukan berbagai macam strategi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Nurul Islam Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yaitu memotivasi guru untuk kreatif dan inovativasi dalam proses belajar mengajar, mengikutkan guru dalam kegiatan pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya untuk menambah pengetahuan dan wawasan guru dalam dunia pendidikan, menekankan kedisiplinan dari segi pemanfaatan waktu belajar, pembuatan perangkat pembelajaran maupun pakaian, melakukan supervisi (pengawasan) dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran maupun dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dan penambahan jam pelajaran khusus untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam karena materinya sangat luas [6].

Kepala sekolah harus mempunyai kemampuan untuk berpikir dari segi tindakan kepala sekolah agar dapat membantu organisasi sekolah untuk beradaptasi dengan dunia luar. Strategi kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap [7]. Kepala sekolah merupakan pemimpin suatu sekolah tempat dimana terjadi interaksi antara guru dan peserta didik, yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah dan mempunyai peranan besar dalam mengembangkan mutu

pendidikan di sekolah [4]. Program sekolah penggerak ini diterapkan pada satuan pendidikan dasar dan menengah tersebar diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6555/C/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak. Salah satu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak di kabupaten Ogan Komering Ilir yakni SMP Negeri 3 Kayuagung.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Kayuagung merupakan salah satu sekolah yang mendapat mandat untuk melaksanakan program sekolah penggerak namun beberapa temuan seperti pelaksanaan program masih terkendala penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP), asesmen diagnostic, penilaian rapor, dan penyusunan proyek profil pelajar Pancasila, program bantuan dana dan/atau bentuk sasaran fisik sehingga proses pengimbasan ke sekolah lain sulit dilakukan, program peningkatan mutu keberlanjutannya tidak didukung oleh ekosistem yang memadai terutama tingkat daerah, masih kurangnya dukungan beberapa wali siswa dalam kegiatan, adanya sarana prasarana seperti bangunan sekolah yang masih perlu di perbaiki (rehab), sekolah membutuhkan biaya yang besar dalam melaksanakan program sekolah penggerak walaupun sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat dengan memberikan bantuan BOS Kinerja.

Selain itu adanya beberapa guru yang belum memahami manfaat program sekolah penggerak, pemanfaatan teknologi belum maksimal disebabkan penguasaan teknologi yang masih kurang terutama guru dan pegawai yang akan memasuki masa purnabakti. Disamping itu ditemukan hal-hal yang positif seperti prestasi siswa yang selalu mendapat penghargaan pada setiap kompetensi. Kepala sekolah menjadi pendorong utama dan faktor kunci keberhasilan program sekolah penggerak. Mencermati uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan riset tentang strategi kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak dengan mengambil lokasi di SMP Negeri 3 Kayuagung karena tata kelola penyelenggaraan pembelajaran yang baik, prestasi dan penghargaan yang banyak diraih oleh siswa tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Sekolah ini memiliki lima intervensi dalam pengelolaan pendidikan yakni pendampingan, penguatan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami strategi kepala sekolah dalam implementasi program Sekolah Penggerak sebagai wujud usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, mulai April sampai dengan Juli 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, tim kerja program sekolah penggerak, perwakilan komite sekolah, dan guru. Informan penelitian ini ditentukan dengan kriteria yaitu (1) mengalami langsung situasi dan kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian; (2) mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya, terutama dalam sifat alamiah dan maknanya; (3) bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama; (4) bersedia untuk diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung; dan (5) memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada Kepala sekolah, Wakil Kepala bidang Kurikulum, Ketua Tim Kerja Program Sekolah Penggerak, Guru, dan Perwakilan Komite Sekolah. Observasi digunakan bertujuan untuk mengamati yang tentu ada hubungan dengan penelitian ini. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui secara sistematis situasi dan kondisi lingkungan satuan pendidikan, perilaku-perilaku yang ada di dalam lingkungan sekolah. Teknik dokumentasi digunakan untuk mencatat tentang sejarah, visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah,

data sarana prasarana, data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik, maupun dokumen program sekolah penggerak, sehingga memperoleh gambaran tentang kondisi pelaksanaan program sekolah penggerak dan memperkuat hasil analisis data dan pembahasan penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang menjelaskan strategi kepala sekolah dalam mendukung implementasi program sekolah penggerak. Data dianalisis dengan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan merupakan faktor penting dan menentukan dalam kehidupan berbudaya, berbangsa dan bernegara. Kemajuan bangsa diukur dari kualitas pendidikannya [8]. Sistem pendidikan nasional Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan kehidupan bangsa yang bermutu baik dalam arti moral spiritual maupun mutu dalam arti intelektual-profesional. Sekolah penggerak merupakan layanan pembelajaran berpusat pada siswa secara holistik dan berpusat pada pembentukan karakter siswa dengan sumber daya manusia kepala sekolah dan guru yang tangguh dan unggul. Sekolah penggerak bisa menjadi inspirasi bagi kepala sekolah dan guru guru lain yang ingin sekolahnya berkualitas serta menjadi panutan serta menjadi tempat pelatihan untuk sekolah penggerak. Tenaga pendidik yang ada disekolah penggerak dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa searah tapi beragam aktivitas yang menggembarakan [9].

Tujuan Program Sekolah Penggerak adalah peningkatan kompetensi dan karakter dengan menjamin pemerataan mutu pendidikan melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah memimpin dan mencapai pembelajaran berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat berfokus pada peningkatan kualitas, serta menciptakan semangat berkolaboratif bagi para pemangku kepentingan pada lingkup sekolah, pemerintah daerah maupun pusat. (Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1177/M/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah penggerak)

Adapun ciri ciri sekolah penggerak yaitu: *pertama*, memiliki kepala sekolah yang mampu mengembangkan kompetensi guru serta pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Dimana kepala sekolah mampu menggerakkan operasional sekolah serta menjadi fasilitator untuk semua guru di sekolah. *Kedua*. Sekolah penggerak memiliki tenaga pendidik yang berorientasi pada siswa, serta berkemampuan membedakan kompetensi siswa sehingga dapat memberikan pengajaran yang berbeda sesuai kemampuan siswa. *Ketiga*. Sekolah penggerak mampu melahirkan peserta didik yang bertaqwa, beriman kepada Tuhan YME berfikir kritis, serta peduli terhadap sesama, mandiri dan bertanggung jawab, dan punya rasa kebhinnikaan global yang berbeda kultur dan budaya. *Keempat*. Sekolah penggerak memiliki komunitas penggerak bersama, berkolaborasi, bersinergi menciptakan inovasi pembelajaran yang berdampak pada kualitas pendidikan di sekolahnya [9].

Sekolah penggerak terdapat lima intervensi yang saling terkait diantaranya pendampingan implementasi pada sekolah penggerak yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan atau kendala yang ada disekolah, serta sekaligus merencanakan program program disekolah penggerak. Penguatan sumber daya manusia terutama implementasi pelatihan dengan paradigma baru kepada kepala sekolah, pengawas, dan guru. Pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran yang disederhanakan serta waktu yang mencukupi untuk memahami konsep pembelajaran. Memberikan keleluasaan dalam merancang pembelajaran serta memilih perangkat pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Kegiatan pembelajaran tidak harus didalam kelas tetapi pembelajaran boleh dilakukan diluar kelas. Berorientasi pada pendidikan karakter dan kompetensi umum [9].

Program Sekolah Penggerak merupakan (1) program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah yang berfokus pada komitmen Pemda; (2) secara holistik memerlukan intervensi dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah; (3) mencakup seluruh kondisi sekolah, negeri dan swasta; (4) pendampingan program dilakukan selama tiga tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya

transformasi secara mandiri; dan (5) terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak [10].

Peran kepala sekolah sangat penting dalam semua jenjang dan jenis pendidikan, agar mereka mampu dan dapat melaksanakan fungsinya. Peran yang mereka miliki itu, diharapkan dapat menguatkan atau melandasi peranan dan tanggungjawabnya sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, dan innovator pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator (EMASLIM). Program sekolah penggerak, bertujuan untuk mengurangi kelemahan dalam kinerja dan kemampuan manajerial kepala sekolah. Program ini dirancang secara menyeluruh dan memiliki karakteristik tertentu, menjadi inisiatif pemerintah yang diadopsi oleh semua tingkatan sekolah dengan tujuan perubahan yang berkelanjutan. Program sekolah penggerak menunjukkan perbedaan dalam pemilihan kepala sekolah, dimana kepala sekolah yang dipilih diharapkan memiliki kompetensi kepemimpinan yang kreatif, kolaboratif, komunikatif, analitis, serta pengalaman yang kaya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam kualitas pembelajaran dan meminimalkan disparitas antar kelompok siswa.

Program Sekolah Penggerak merupakan evolusi dari program transformasi sekolah sebelumnya. Langkah ini dirancang untuk mempercepat perkembangan sekolah, baik negeri maupun swasta. Implementasi program dilakukan secara bertahap dan diintegrasikan secara menyeluruh dalam ekosistem pendidikan, dengan tujuan akhir menjadikan setiap sekolah di Indonesia sebagai bagian dari Program Sekolah Penggerak. Pada program sekolah penggerak, kepala sekolah idealnya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan aktif dan dapat memberikan dorongan kepada guru dalam meningkatkan kreativitas khususnya dalam mengajar, sehingga meningkatkan kemampuan mendapatkan hasil yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno, ia mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin seperti kepala sekolah harus mampu memotivasi dan menggerakkan anggota organisasinya agar tujuan bisa tercapai dengan baik (Siswanto et al., 2022; Wibawani et al., 2023:1083).

Peran kepala sekolah dalam sekolah penggerak memiliki pengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan kepala sekolah bukan hanya sebagai pemimpin, administrator, tetapi juga manajer. Semua aspek terkait dengan sekolah, termasuk sumber daya manusia dan fasilitas, menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, penting bagi kepala sekolah untuk menetapkan arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Seorang kepala sekolah harus memiliki 5 (lima) kompetensi, yaitu (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi supervisi, (4) kompetensi kewirausahaan, dan (5) kompetensi sosial [9]. Program ini memiliki standar minimum yang harus dipenuhi, termasuk dalam proses pembelajaran, evaluasi, pembiayaan, dan aspek lainnya. Kualitas sekolah sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah, sehingga kontribusinya terhadap kemajuan sekolah di masa depan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting bagi kepala sekolah merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi dengan baik. Strategi kepala sekolah dalam mengimplementasikan program sekolah penggerak yaitu memperhatikan beberapa hal seperti:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan program sekolah penggerak. Guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam melaksanakan proses pembelajaran memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) [12]. Kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain, sekolah penggerak adalah katalis. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dan diawali dengan sumber daya manusia yang unggul.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kayuagung telah melaksanakan strategi program sekolah penggerak Sumber Daya Manusia seperti: (a) peningkatan jenjang pendidikan maupun peningkatan kompetensi melalui kegiatan bimbingan teknis, (b) workshop, dan (c) lokakarya dan pelatihan kompetensi lainnya. Strategi tersebut dapat memberikan dampak bagi proses dan hasil pelaksanaan program sekolah penggerak. Selain itu, dilakukan penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching one to one*) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh kemendikbud. Pentingnya sumber daya manusia dalam mengelola program sekolah penggerak menjadi hal utama yang harus diperhatikan kepala sekolah dalam mengatur strategi pengelolaan, penguatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia.

b. Pengelolaan Pembelajaran

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kayuagung telah melakukan strategi program sekolah penggerak dalam mengelola pembelajaran seperti: (a) menerapkan kurikulum merdeka, (b) mengembangkan kurikulum operasional pembelajaran dengan prinsip diversifikasi, dan (c) mengelola kegiatan pembelajaran dengan pendekatan yang berdeferensiasi. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kayuagung menerapkan kurikulum merdeka sebagai syarat menjadi sekolah penggerak karena program tersebut merupakan bagian dari proses implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya, bentuk implementatif kurikulum merdeka pada satuan pendidikan dengan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) sebagai pedoman yang berlaku secara kongkrit di sekolah tersebut. Pengembangan Kurikulum SMP Negeri 3 Kayuagung dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah).

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kayuagung mengelola pembelajaran dengan pendekatan yang berdeferensiasi, yaitu pendekatan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan kurikulum merdeka. Sejalan dengan hasil penelitian Pitaloka, bahwa diferensiasi proses mengacu kepada cara guru dalam mengajak peserta didik untuk masuk ke dalam kegiatan pembelajaran dan menemukan pengetahuan mereka secara mandiri dalam proses tersebut. Guru dituntut untuk menyiapkan pertanyaan pemantik, materi yang menarik, serta menantang agar peserta didik menikmati proses yang disajikan oleh guru [13]. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Peserta didik tidak harus menerima pembelajaran di dalam kelas dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi bisa dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar secara maksimal.

Kepala sekolah sebagai ujung tombak dalam pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan berkewajiban untuk memperhatikan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik seperti pembelajaran berdeferensiasi karena implementasi program sekolah penggerak juga melibatkan proses pembelajaran yang berorientasi pada proses pembelajaran berdeferensiasi yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa karena pembelajaran ini dapat meningkatkan relasi yang kuat antar guru dan siswa. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan dan hasil yang diharapkan dari program sekolah penggerak [13].

c. Sarana Prasarana

Keberadaan sarana prasarana pendidikan di satuan pendidikan tidak bisa dianggap sederhana oleh satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah sebab sarana prasarana secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan lancar tidaknya proses pembelajaran di sekolah, oleh karena itu kepala sekolah dalam mengelola dan memenuhi sarana prasarana pendidikan apalagi dengan adanya program sekolah penggerak harus mengacu pada tata kelola sarana prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana yang ditetapkan oleh

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dengan standar tersebut kepala sekolah dapat mengatur strategi pengelolaan, pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program sekolah penggerak. Acuan tersebut didasarkan pada kepentingan peserta didik dan standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kayuagung telah melakukan strategi pengelolaan sarana dan prasarana seperti: (a) merencanakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis siswa SMP tertentu; (b) mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan; (c) memperhatikan kebutuhan akomodasi sarana dan prasarana yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas; (d) menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar sekolah; (e) mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan peserta didik dalam menggunakan sarana dan prasarana; dan (f) menggunakan sarana dan prasarana yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Program sekolah penggerak membutuhkan sarana prasarana yang memenuhi standar kriteria minimal agar program tersebut terlaksana dengan baik dan dapat memberikan dampak bagi kemajuan pendidikan dan prestasi peserta didik. Kenyamanan belajar peserta didik ikut dipengaruhi oleh kehadiran sarana prasarana yang memadai dan lengkap serta aman digunakan dalam proses pembelajaran.

d. Pembiayaan

Standar pembiayaan pada satuan pendidikan secara umum yang dijadikan acuan yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Standar Pembiayaan adalah kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Standar pembiayaan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kayuagung telah melakukan strategi penggerak pembiayaan seperti: (a) mengelola dana BOS yang relevan dengan kebutuhan, (b) mengadakan kerjasama dalam hal pembiayaan, dan (c) mengatur dana internal sekolah. Mengatur dan mengelola dana yang diberikan pemerintah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan kebutuhan, maka dalam tataran operasionalnya sekolah menyusun pembiayaan berdasarkan petunjuk dana BOS berpedoman pada komponen pembiayaan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan termasuk pembiayaan program sekolah penggerak membutuhkan pembiayaan yang lebih besar sehingga membutuhkan dana yang besar pula maka langkah kepala sekolah dengan mencari tambahan pembiayaan dari unsur eksternal seperti Komite Sekolah atau pemangku kepentingan lain seperti BUMN maupun sumbangan biaya dari orang tua peserta didik atas inisiatif individu orang tua peserta didik.

Mekanisme kolaborasi dan kerjasama dengan pihak lain untuk menguatkan aspek pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan langkah tepat karena satu sisi mendapatkan pemenuhan pembiayaan, disisi lain memberikan kesempatan pada pihak lain untuk ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan. Selain secara internal kepala sekolah mengatur penggunaan dana internal sekolah dengan mengedepankan pelaksanaan program prioritas yang sesuai kebutuhan peserta didik dan keberhasilan program sekolah penggerak.

e. Perencanaan Berbasis Data

Kepala sekolah merupakan elemen penting dalam pembenahan tata kelola dan menjadi motor penggerak setiap satuan pendidikan sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui pembenahan sistem yang

mendukung pada peningkatan kualitas pendidikan. Kepala sekolah merupakan guru yang mampu mengintegrasikan profesionalisme sebagai guru dan kompetensinya sebagai pemimpin manajerial sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, serta peningkatan hasil belajar siswa. Perencanaan Berbasis Data (PBD) memiliki urgensi agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu satuan pendidikannya. Selain itu, PBD sebagai bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan, dinas pendidikan dan pemerintah daerah terhadap mutu capaian pendidikan yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun lembaga pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kayuagung telah melakukan strategi perencanaan berbasis data seperti: (a) mengidentifikasi kebutuhan proses dalam pengumpulan data dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah melalui indikator prioritas yang ada dalam rapor pendidikan, (b) melakukan refleksi diri yakni proses analisis dan refleksi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, termasuk evaluasi spesifik permasalahan, mencari pola dan tendensi, dan menemukan akar masalah atau kesenjangan, (c) memperbaiki hasil analisis dan refleksi, serta menyusun rencana perbaikan atau program yang akan dijalankan untuk mengatasi akar permasalahan dan mengevaluasi keberhasilan perbaikan atau program dengan data yang valid dan dapat diukur; (d) melakukan kegiatan merupakan serangkaian langkah konkret yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan tujuan untuk menghasilkan dampak atau perubahan yang diinginkan. Kegiatan dapat berupa tindakan fisik, proses, atau interaksi yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai hasil tertentu.

Hasil penelitian di SMP Negeri 3 Kayuagung menunjukkan kepala sekolah melakukan perencanaan berbasis data dalam implementasi program sekolah penggerak. Sebelumnya penelitian Mahendra dkk menunjukkan pelaksanaan tersebut telah berlangsung sesuai harapan meliputi identifikasi masalah, refleksi, benahi, dan kegiatan.[14] Identifikasi masalah dilakukan sekolah melalui indikator prioritas yang ada dalam rapor pendidikan berdasarkan hasil dari asesmen nasional, menemukan masalah kemampuan numerasi dan karakter berada pada pencapaian menurun atau rendah. Selebihnya, pada indikator lain pencapaian telah baik. Sekolah mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, termasuk evaluasi spesifik permasalahan, mencari pola dan tendensi, dan menemukan akar masalah atau kesenjangan. Selanjutnya, melakukan pengambilan tindakan perbaikan berdasarkan hasil analisis dan refleksi, termasuk menyusun rencana perbaikan atau program yang akan dijalankan untuk mengatasi akar permasalahan. Prioritas perbaikan pada rapor pendidikan aspek yang menurun dengan membuat program pembimbingan belajar dan mengimplementasikan praktik pembelajaran interaktif. Sekolah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan program. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif semua stakeholder, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya [14].

f. Digitalisasi Sekolah

Pembelajaran abad 21 lebih menekankan pada penerapan *critical thinking*, *communication*, *creative*, dan *collaboration* (4C). Guru dan peserta didik merupakan kesatuan pada proses pembelajaran yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri pada proses pencapaian tujuan pembelajaran. Digitalisasi bukanlah hal baru dalam bidang Pendidikan, namun istilah ini kurang mendapat perhatian karena sudah berada pada zona nyaman yang membuat kebiasaan lama pada proses pembelajaran selalu dipertahankan dan membuat tidak ada inovasi dalam pembelajaran dan terkesan monoton. Guru dan peserta didik mau atau tidak harus keluar dari zona nyaman agar lebih berpikir kreatif dalam menciptakan suasana belajar sehingga mampu menghadapi persaingan.

Digitalisasi Sekolah adalah inovasi baru di bidang pendidikan dengan mengarahkan

adaptasi teknologi bagi peserta didik dan guru [15]. Digitalisasi sekolah memudahkan proses pembelajaran karena tersedia akses seluruh bahan ajar dan ujian melalui jaringan [16]. Implementasi digitalisasi sekolah, tetap menggunakan proses belajar konvensional dengan cara tatap muka sebagai cara yang terbaik, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik. Program digitalisasi sekolah menjadi terobosan baru sebagai fasilitas memudahkan proses belajar mengajar. Disamping itu, komunitas guru juga dapat berkolaborasi dalam membuat bahan ajar digital maupun bahan ulangan harian bersama secara luar jaringan (luring/offline) dan dalam jaringan (daring) [17].

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kayuagung telah melakukan strategi digitalisasi sekolah seperti: (1) pendaftaran peserta didik baru online; (2) pembelajaran online; (3) penilaian digital; (4) digitalisasi bahan ajar; (5) administrasi mengajar guru; (6) peningkatan kapasitas dan kecepatan internet sekolah; dan (7) penyediaan perangkat komputer untuk proses pembelajaran. Intervensi digitalisasi sekolah menjadi keharusan yang dilaksanakan sekolah dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini untuk mendukung peningkatan transformasi pendidikan [17]. Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customzed. Adapun platform yang dimaksud sebagai berikut: (1) Platform guru. Profil dan pengembangan kompetensi (alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis *microlearning* dan habituasi); (2) platform pembelajaran (alat bantu guru untuk menjalankan pembelajaran kompetensi holistik dan pembelajaran terdiferensiasi); (3) platform sumber daya sekolah (meningkatkan fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah); dan (4) dashboard rapor pendidikan (memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis) [14].

g. Keterlibatan Pemangku Kepentingan (stakeholder)

Pemangku kepentingan pendidikan (*Stakeholder* pendidikan) sebagai perorangan, atau kelompok, atau lembaga yang peduli pendidikan menjadi pendorong terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Pada pelaksanaan program sekolah penggerak, peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) sangat membantu dalam mendukung program sekolah, memberikan bantuan finansial maupun menyediakan sarana prasarana tambahan serta ide atau gagasan untuk kemajuan sekolah.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruhnya terhadap suatu isu, *stakeholder* dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu: (1) *stakeholder* primer atau utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek; (2) *stakeholder* sekunder (pendukung) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*concern*) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah dan (3) *stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan [18]. Pada lembaga pendidikan *stakeholder* dibedakan menjadi dua, yaitu *stakeholder* internal dan eksternal; meliputi kepala sekolah, waka, guru, tenaga administrasi dan siswa, sedangkan eksternal meliputi orangtua, masyarakat, dan pemerintah [19]. Semuanya memiliki kepentingan masing-masing terhadap pendidikan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kayuagung telah melakukan strategi sekolah melibatkan pemangku kepentingan, yaitu melibatkan wakil kepala sekolah, dewan guru dan staf dalam menyusun rencana strategi sekolah. Selain itu, juga melibatkan orangtua siswa, dan tokoh masyarakat dalam mengambil kebijakan terkait kepentingan sekolah secara umum.

Stakeholder di dalam lembaga Sekolah berbentuk organisasi yang disebut komite sekolah, adapun tugas komite sekolah yaitu: (1) kebijakan dan program sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/ RKAS); kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain, (2) menggalang dana dan sumber dana pendidikan lainnya

dari masyarakat, baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, (3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, (4) menindaklanjuti, keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah (Permendibud No. 75 Tahun 2016 [18].

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan program sekolah penggerak sangat dibutuhkan, terutama untuk mempermudah jalannya proses pembelajaran dan pendidikan secara digital [20]. Dukungan *stakeholder* itu menguatkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program sekolah penggerak sebab pemangku kepentingan pendidikan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dalam program sekolah penggerak. Maka peran kepala sekolah dalam menentukan setiap keterlibatan pemangku kepentingan. Proses memilih kelompok *stakeholder* yang menjadi sasaran untuk dilakukan pemenuhan kebutuhan dan harapannya disebut dengan proses menetapkan *stakeholder* potensial. Proses penentuan *stakeholders* harus menyesuaikan dengan kondisi internal lembaga saat ini dan yang akan datang, sehingga apa yang diinginkan dan diharapkan mereka dapat dipenuhi oleh lembaga [18]. Oleh karena itu, sebelum menganalisis, maka lembaga pendidikan harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya yang ada di lembaga tersebut, termasuk budaya kerja yang positif untuk kemajuan lembaga [21].

Kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan yang memiliki kewenangan dalam menentukan dan memutuskan kebijakan harus cermat dalam menentukan keterlibatan pemangku kepentingan dengan tujuan keterlibatannya pada program sekolah penggerak. Mereka dapat memberikan dampak pada proses pelaksanaan dan hasil program sekolah penggerak untuk kemajuan sekolah dan peserta didik. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki strategi tertentu dalam melihat *stakeholders* sebagai komponen penting yang membantu sekolah dalam meningkat mutu pendidikan.

4. Kesimpulan

Strategi kepala sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak meliputi (1) penguatan sumber daya manusia, seperti bimbingan teknis, workshop, lokakarya dan pelatihan kompetensi lainnya; (2) pengelolaan pembelajaran yang berbasis pendekatan pembelajaran berdeferensiasi, seperti menerapkan kurikulum merdeka, (b) mengembangkan kurikulum operasional pembelajaran dengan prinsip diversifikasi, dan (c) mengelola kegiatan pembelajaran; (3) penyediaan sarana prasarana pendukung program sekolah penggerak, seperti merencanakan sarana dan prasarana, mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan siswa, memperhatikan kebutuhan akomodasi sarana dan prasarana disabilitas, menggunakan sumber daya sekolah, mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan siswa, dan menjaga kelestarian lingkungan Program sekolah penggerak; (4) pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah dan pembiayaan dari *stakeholders*, seperti mengelola dana BOS, mengadakan kerjasama, dan mengatur dana internal sekolah (5) proses digitalisasi sekolah seperti pendaftaran peserta didik baru online, pembelajaran online, penilaian digital, digitalisasi bahan ajar, administrasi mengajar guru, peningkatan kapasitas dan kecepatan internet sekolah, dan penyediaan perangkat komputer untuk proses pembelajaran, (6) keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan program, pelaksanaan program dan pengawasan implementasi program seperti wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, orangtua siswa, dan tokoh masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] N. Dowansiba and Hermanto, "Strategi Kepala Sekolah Menengah Atas dalam Menyiapkan Sekolah Penggerak," *J. Pendidik. dan Kebud.*, vol. 7, no. 2, pp. 125–137, 2022, doi: 10.24832/jpnk.v7i2.3060.
- [2] S. M. Saesaputri, N. Fuad, and S. Zulaikha, "Optimization Of Character Education Through The Project Strengthening Of Profile Pancasila Students At Senior High School Bekasi," *Int. Conf. Digit. Adv. Tour. Manag. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 481–486, 2023, doi: 10.56910/ictmt.v1i2.109.

- [3] Muhadjir Effendy, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah," *Kementrian Pendidik. dan Kebud.*, pp. 1–21, 2018.
 - [4] S. Susanti, B. Lian, and Y. Puspita, "Implementasi Strategi Kepala Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 4, no. 2, pp. 1644–1657, 2020, doi: 10.31004/jptam.v4i2.629.
 - [5] E. Sriwahyuni, M. Kristiawan, and W. Wachidi, "Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (Snp) Pada Smk Negeri 2 Bukittinggi," *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, vol. 4, no. 1, p. 21, 2019, doi: 10.31851/jmksp.v4i1.2472.
 - [6] Y. Sari, S. Khosiah, and K. Maryani, "Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru PAUD," *Golden Age*, vol. 4, no. 1, 2020.
 - [7] N. U. Sri Banun, Yuzrizal, "Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Unggul," *J. Adm. Univ. Pascasarj. Kuala, Syiah*, vol. 4, no. 1, pp. 137–147, 2016.
 - [8] E. Suncaka, "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia," *J. Manajemen Dan Pendidik.*, vol. 02, no. 03, pp. 36–49, 2023, [Online]. Available: <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>
 - [9] D. Mariana, "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah Penggerak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5, no. 20, pp. 10228–10233, 2021, [Online]. Available: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2606>
 - [10] M. Kamal and S. Rochmiyati, "Indikator Kemandirian dalam Profil Pelajar Pancasila pada Akhir Fase C Rentang Usia 12 – 15 Tahun," *Tarb. Wa Ta'lim J. Penelit. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 9, no. 3, pp. 150–171, 2022, doi: 10.21093/twt.v9i3.4734.
 - [11] Siswanto, A. Muhson, Rosidah, and E. A. Wibawa, "The teaching readiness of pre-service teachers from the economics and business education programs," *Cakrawala Pendidik.*, vol. 41, no. 3, pp. 676–687, 2022, doi: 10.21831/cp.v41i3.50016.
 - [12] F. F. Syafi'i, "Merdeka belajar: sekolah penggerak," *Pros. Semin. Nas. Pendidik. DASAR "Merdeka Belajar dalam Menyambut Era Masy. 5.0,"* no. November, pp. 46–47, 2021.
 - [13] H. Pitaloka and M. Arsanti, "Pembelajaran Diferensiasi dalam Kurikulum Merdeka," *Semin. Nas. Pendidik. Sultan ...*, no. November, pp. 2020–2023, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sendiksa/article/view/27283>
 - [14] Y. I. Mahendra, S. Mus, and Wahira, "Perencanaan Berbasis Data Pada Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di UPT SMPN 9 Binamu Kabupaten Jenepono," *Pinisi J. Heal. Sport Sci.*, pp. 1–11, 2023.
 - [15] C. Nay and F. Dopo, "Upaya Digitalisasi Pendidikan Melalui Program Kerja Adaptasi Teknologi di Sekolah Sasaran Kampus Mengajar," *Jiip - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 7, no. 1, pp. 51–59, 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i1.3115.
 - [16] S. Badi'ah, L. Salim, and M. C. Syahputra, "Pesantren dan Perubahan Sosial pada Era Digital," *Anal. J. Stud. Keislam.*, vol. 21, no. 2, pp. 349–364, 2021, doi: 10.24042/ajsk.v21i2.10244.
 - [17] Basri, Khairinal, and Firman, "Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Fungsi Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Merangin," *J. Ilm. Dikdaya*, vol. 11, no. 2, p. 349, 2021, doi: 10.33087/dikdaya.v11i2.233.
 - [18] E. B. Sambani *et al.*, "Sistem informasi pencarian tempat kos di kota tasikmalaya berbasis mobile," vol. XII, no. 2, pp. 103–111, 2023.
 - [19] A. Syahri, S. Yahya, and A. M. A. Saleh, "Teaching Religious Moderation by Islamic Education Lecturers: Best Practices at Three Islamic Universities in Mataram City," *EDUKASI J. Penelit. Pendidik. Agama dan Keagamaan*, vol. 22, no. 1, pp. 1–18, 2024, doi: 10.32729/edukasi.v22i1.1737.
 - [20] S. N. Ismail, M. N. Omar, Y. Don, Y. W. Purnomo, and M. D. Kasa, "Teachers' acceptance of mobile technology use towards innovative teaching in Malaysian
-

- secondary schools,” *Int. J. Eval. Res. Educ.*, vol. 11, no. 1, pp. 120–127, 2022, doi: 10.11591/ijere.v11i1.21872.
- [21] Rianahsari, H. Fitria, and S. Eddy, “Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Pedagogik, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri Kecamatan Padang ...,” *J. Educ.*, vol. 06, no. 01, pp. 2465–2480, 2023, [Online]. Available: <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/31282%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/31282/9/9>
NIM. 8156132018 BAB I.pdf
-